

p-ISSN 2623-1911
e-ISSN 2623-1980

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
LINGKUNGAN LAHAN BASAH
VOLUME 7 NO 2 2022**

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH**



PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH**Diterbitkan oleh**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat

Terbit secara berkala setahun sekali pada bulan April, setelah artikel-artikel disampaikan secara oral pada seminar (pertemuan ilmiah) nasional bulan November tahun sebelumnya

Penanggung Jawab

Ketua LPPM ULM

Dewan Penyunting

Prof. Dr. Mochamad Arief Soendjoto, M.Sc.

Dr. Dharmono, M.Si.

Maulana Khalid Riefani, S.Si., M.Sc.

Muhammad Lutvi Ansari, S.Pd., M.Pd.

Rizky Ary Septiyan, S.Pd., M.Pd.

Noor Sahdi, S.Pd., M.Pd.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Mochamad Arief Soendjoto, M.Sc.

Dr. Dharmono, M.Si.

Dra. Sa'adaturrehmi

Yenny Miratriana Hesty, S.P.

Halimudair, S.Pd.

Administrasi, Keuangan, Publikasi Daring

Ilhamsyah Darusman

Dwi Mulyaningsih, S.Pd.

Wahyudi, S.E.

Alamat Redaksi:

LPPM ULM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat)

Jalan Hasan Basry, Kayutangi, Banjarmasin 70123, Indonesia

Telp./Fax. +62-511-3305240

Laman: <http://lppm.ulm.ac.id/id>

Surel: lppm@ulm.ac.id

Full Issue

View or download the full issue

Table of Contents

Articles

[EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA \(KKBPK\) DI KALIMANTAN SELATAN](#)

Agung Biworo, Lenie Marlinae, Syamsul Arifin, Laily Khairiyati, Agung Waskito, Anugrah Nur Rahmat, Herty Sasmieta, M Gilmani, Winda Saukina Syarifatul Jannah, Raudatul Jinan

[PENGARUH PEMBERIAN TKKS DAN ABU SEKAM PADI TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN KELOR \(Moringa oleifera\) DI TANAH SULFAT MASAM](#)

Antar Sofyan, Rabiatal Wahdah, Aswarin

[SENYAWA BARU TURUNAN N,O-KARBOKSIMETIL KITIN SEBAGAI ANTIOKSIDAN SANGAT KUAT BERDASARKAN HASIL ANALISIS HUBUNGAN KUANTITATIF STRUKTUR-AKTIVITAS](#)

Uripto Trisno Santoso, Taufiqur Rohman, Noor Hidayah, Diah Lisa Setiani, Ismira Dwi Savitri, Nafisah, Emaratu Risqa

[RESPON VIABILITAS BENIH DUA GENOTIPE KACANG TUNGGAK TERHADAP KONSENTRASI SARI AKAR ECENG GONDOK](#)

Raihani Wahdah, Hikma Eliya, Erni Auliyani

[PERSEPSI GENERASI MUDA PEDESAAN TERHADAP PEKERJAAN SEBAGAI PETANI DI LAHAN BASAH KALIMANTAN SELATAN](#)

Hairi Firmansyah, Mariani, Nuzula Almira Salsabila

[KOSAKATA ALAT DAN AKTIVITAS MENANGKAP IKAN TRADISIONAL YANG TERANCAM PUNAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DAN MAKNA SIMBOLNYA: PERSPEKTIF SOSIOLINGUISTIK](#)

Muhammad Rafiek, Rustam Effendi

[ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS KOMUNITAS LOKAL GENERASI MILENIAL DI KOTA BANJARMASIN](#)

Irwansyah, Novia Nour Halisa, Syamaratul Hidayah

[KONDISI EKONOMI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH ERA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BANJAR](#)

Jamaluddin, Surliansyah Umar, Haitami

[PENGEMBANGAN BUKU MEMBACA ALA MONTESSORI UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR](#)

Dessy Dwitalia Sari, Tika Puspita Widya Rini

[ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS KOMUNITAS LOKAL GENERASI MILENIAL DI KOTA BANJARMASIN](#)

Irwansyah, Novia Nour Halisa, Syamaratul Hidayah

[PROKSIMAT, TPC \(TOTAL PLATE COUNT\) DAN ORGANOLEPTIK TEPUNG DAGING BELUT \(Monopterus albus Zuleuw\) DENGAN PROSES PEMASAKAN BERBEDA](#)

Candra, Purnomo, Fitria Handayani

[MODEL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI \(DAS\) MARTAPURA DI KALIMANTAN SELATAN BERDASARKAN ASPEK KELEMBAGAAN](#)

Safa Muzdalifah, Farah Qubayla

[TELAAHAN ASPEK REPRODUKSI IKAN TAMBAKAN \(Helostoma teminckii\) DI PERAIRAN RAWA MONOTON DANAU PANGGANG](#)

Pahmi Ansyari, Slamet

[TINJAUAN KESUBURAN TANAH AREAL BERGAMBUT YANG TELAH DIBUKA DAN MASIH ALAMI DI PEAT TECHNO PARK UPR](#)

Jagor Kifan Ekoputra, Fengky F. Adji, Herianto

[KINERJA SUPERVISOR DALAM MENINGKATKAN INOVASI VARIASI PEMBELAJARAN PASCA BANJIR DI KALIMANTAN SELATAN](#)

Sunarno Basuki, Nurdiansyah, Perdinanto

[INFEKSI CACING USUS DAN STRUKTUR GALT AYAM KAMPUNG YANG DIPELIHARA DI SEKITAR LAHAN PERSAWAHAN KECAMATAN GAMBUT](#)

Ahmad Husairi, Erida Wydiamala, Muhammad Dawud Ashari, Widi Aurelia Mirmaningtyas

[DIGITALISASI SUMBER BELAJAR SEJARAH MENYONGSONG PENDIDIKAN ERA 4.0](#)

Mohamad Zaenal Arifin Anis, Fitri Mardiani

[PRODUKSI DAN EFISIENSI AGRONOMI PUPUK KANDANG AYAM PADA TANAMAN EDAMAME DI TANAH GAMBUT](#)

Djoko Eko Hadi Susilo, Saijo, Pienyani Rosawanti

[ANALISA KEBERHASILAN TANAMAN REHABILITASI DAS KAWASAN GUNUNG BATU KABUPATEN TANAH LAUT MENGGUNAKAN DATA DEM \(DIGITAL ELEVATION MODEL\)](#)

Fandi Oktiawan, Rodianor, Gusti Ahmad Erfani, Trisnu Satriadi

ANALISA KEBERHASILAN TANAMAN REHABILITASI DAS KAWASAN GUNUNG BATU KABUPATEN TANAH LAUT MENGGUNAKAN DATA DEM (DIGITAL ELEVATION MODEL)

Fandi Oktiawan, Rodianor, Gusti Ahmad Erfani, Trisnu Satriadi

TINGKAT EROSI AREAL REHABILITASI DAS KAWASAN GUNUNG BATU KABUPATEN TANAH LAUT

Rodianor, Fandi Oktiawan, Ari Subagyo, Trisnu Satriadi

FAKTOR RISIKO SINDROM METABOLIK PADA PEKERJA PERTAMBANGAN BATU BARA (STUDI PADA PT. X DI KALIMANTAN SELATAN)

Ratna Setyaningrum, Mufatihatul Aziza Nisa, Gusti Firdha Amalia, Muhammad Arwi Firdaus, Widya Wati Rahmadani

KARAKTERISTIK FISIK DAN SENSORI DAGING KERBAU RAWA KALIMANTAN SELATAN (Bubalus bubalis)

Habibah, Tanwirul Millati, Novi Rahmawati

ANALISIS BAHAN AJAR IPA BERWAWASAN LAHAN BASAH UNTUK CALON PENDIDIK IPA

Ratna Yulinda, Rizky Febriyani Putri, Rizky Nyna Amalia, Farida Hayati

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FLASHCARD PENGENALAN HEWAN LINGKUNGAN LAHAN BASAH BERBASIS AUGMENTED REALITY DI PAUD

Chresty Anggreani, Adrie Satrio

ATRIBUT PERMUKIMAN TEPI SUNGAI SEBAGAI PERLUASAN RUANG UNTUK AKTIVITAS DOMESTIK

Dahliani, Purwanita Setijanti

KUALITAS BUKU LKPD ELEKTRONIK KONSEP-KONSEP EKOSISTEM LAHAN BASAH JENJANG SMA

Muhammad Zaini, Sri Amintarti

DEFORESTASI DI KABUPATEN BANJAR DALAM PERSPEKTIF POLITIK LINGKUNGAN

Andi Tenri Sompia, Arif Rahman Hakim, Dinar Adistiyan

PENGEMBANGAN STRATEGI PENGURANGAN RISIKO KEBAKARAN GAMBUT DALAM BINGKAI MEDIA BERDASARKAN JUMLAH HOTSPOT MENGGUNAKAN S-NPP VIIRS

Rosalina kumalawati, Astinana Yulianti, Rizky Nurita Anggraini

IMPLEMENTASI ARTIFICIAL NEURAL NETWORK UNTUK MEMPREDIKSI TINGKAT GETARAN TANAH AKIBAT OPERASI PELEDAKAN PADA TAMBANG TERBUKA BATUBARA

Eko Santoso, Romla Noor Hakim, Juan Pariama

EFEKTIFITAS SISTEM LAHAN BASAH BUATAN ALIRAN VERTIKAL BAWAH PERMUKAAN DENGAN TANAMAN LOKAL DALAM MENYISIHKAN BESI (FE) DI AIR SUMUR

Nopi Stiyati Prihatini, Alfiyyah Nahdah, Rd. Indah Nirtha NNPS, Riza Miftahul Khair

PENGEMBANGAN KAWASAN RAWA GAMBUT BERBASIS ECOEDUTOURISM DI HUTAN LINDUNG LIANG ANGGANG

Nasruddin, Muhammad Efendi

IMPLEMENTASI CLDW PENINGKATAN KETERAMPILAN GENERIK SAINS PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI DI SMA

Aminuddin Prahatama Putra, Kaspul, Nurul Hidayati Utami

UJI STABILITAS FISIK SEDIAAN GEL EKSTRAK ETANOL DAUN KIRINYUH (*Chromolaena odorata* L) DENGAN VARIASI HPMC DAN KARBOPOL

Nurlely, Aulia Rahmah, Prima Happy Ratnapuri, Valentina Meta Srikartika

DINAMIKA POPULASI IKAN BETOK (*Anabas testudineus*) YANG TERTANGKAP DI PERAIRAN RAWA DESA TELOK SELONG KABUPATEN BANJAR

Iriansyah, Rusmilyansari, Aulia Azhar Wahab, Risalatul Mu'awanah

FORMULASI DAN EVALUASI NANOEMULSI DARI EKSTRAK HERBA KELAKAI DENGAN KOMBINASI TWEEN 80 DAN PROPYLENGLIKOL

Prima Happy Ratnapuri, Mia Fitriana, , Anggi Arta R., Nor Sa'adah, Tasya Riskyana Dewi, Helsawati, Diah Aulia Rosanti

POTENSI OLAHRAGA BERBASIS PERAIRAN DI TINJAU DARI SEGI BUDAYA

Herita Warni, Syamsul Arifin, Ramadhan Arifin, Maruful Kahri

PENGARUH BANJIR TERHADAP USAHA BUDIDAYA IKAN DALAM KOLAM DI KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Irma Febrianty, Idlanor Mahyudin, Dina Camelia, Ayu Amalia, Nur Safira Rahmi

PEMANFAATAN DAUN ECENG GONDOK (*Eichhornia crassipes*) SEBAGAI SABUN CUCI MOTOR ANTI KOROSI UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT

Muthia Elma, Aulia Rahma, Awali S. K. Harivram, , Fitri R. Mustalifah, Nurul Huda, Rhafiq A. Ghani, Erdina L. A. Rampun

STRATEGI KETAHANAN PANGAN PETANI LAHAN BASAH MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM DI KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR

Setia Budhi, Sri Hidayah, Mahtia Safitri, Ribka Aprilia, Salamah, Dwi Litha Diyana

STRATEGI KETAHANAN PANGAN PETANI LAHAN BASAH MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM DI KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR

Setia Budhi, Sri Hidayah, Mahtia Safitri, Ribka Aprilia, Salamah, Dwi Litha Diyana

DEFORESTASI DI KABUPATEN BANJAR DALAM PERSPEKTIF POLITIK LINGKUNGAN

Andi Tenri Somp^{1*}, Arif Rahman Hakim², Dinar Adistiyan³

^{1,2} Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin, Indonesia

³ Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin, Indonesia

*Corresponding author: tenri@ulm.ac.id

Abstrak. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan korelasi antara aspek sosial dan politik dengan terjadinya deforestasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Latar belakang penelitian ini adalah justifikasi ilmiah bahwa perubahan lingkungan terjadi sebagai bentuk konstruksi sosial politik yang melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan, terkait ini dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan primer, informan kunci penelitian adalah unsur pemerintah daerah dan kelompok sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat arus *demand* dan *support* dalam proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan hutan, sehingga memunculkan tarik-menarik kepentingan. Tarik menarik kepentingan ini terjadi antara berbagai aktor meliputi pemerintah pusat dan daerah, kalangan oligarki, masyarakat sekitar wilayah hutan, dan kelompok aktifis lingkungan hidup, dari berbagai aktor tersebut, relasi pemerintah dan oligarki merupakan faktor yang dominan dalam kasus deforestasi di Kabupaten Banjar.

Kata kunci: Pemerintah, Oligarki, Perubahan Lingkungan, Deforestasi, Kabupaten Banjar

1. PENDAHULUAN

Asumsi dasar ekologi politik adalah perubahan lingkungan tidak netral melainkan suatu bentuk lingkungan terpolitisasi yang melibatkan banyak aktor di tingkat lokal, regional, dan global (Bryant 2005) Penjelasan lebih lanjut mengenai ekologi politik secara umum, ekologi politik berfokus pada politik, tentang perubahan dan kerusakan lingkungan. (Forsyth 2003) Aspek sosial-politik dianggap berkaitan dengan perubahan lingkungan. Peters dan Pierre (2004:3) mendefinisikan "politisasi sebagai usaha pemerintah untuk mengambil tugas yang sebelumnya (dan secara formal) mungkin dianggap politis." Sedangkan Martini (2010) mendefinisikan politisasi sebagai tindakan untuk membuat sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Sementara itu, Richard M. Ebelin sebagaimana dikutip oleh Erdogan (2004) menyatakan bahwa: "Politisasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan untuk membuat semua pertanyaan politik, masalah masalah politik, semua nilai nilai politik, dan semua keputusan keputusan politik. ."

Dalam sistem politik selalu ada aliran yang berkesinambungan dari input ke output dan arusnya bolak-balik. Input terdiri dari tuntutan dan dukungan yang berasal dari lingkungan. Menurut Gabriel A. Almond input memiliki beberapa fungsi. Fungsi input adalah sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, asosiasi kepentingan, komunikasi politik. Pengambil keputusan dan aktor politik akan mempertimbangkan masukan dan reaksi dari kebijakan yang dibuat. Informasi dikumpulkan dan menghasilkan output. Fungsi keluarannya adalah membuat aturan, menerapkan aturan, dan memutuskan aturan. Dalam sistem ini juga dijelaskan bahwa tekanan tidak hanya berasal dari luar tetapi juga berasal dari dalam sistem itu sendiri. Mengenai masalah lingkungan, Bryant dan Bailey (2001) menjelaskan bahwa lingkungan yang dipolitisasi adalah bentuk dari masalah lingkungan yang berorientasi pada aktor (*Actor Oriented - AO*). Pendekatan aktor mengkaji kepentingan, karakteristik dan tindakan aktor dalam konflik politik dan ekologi.

Deforestasi secara besar-besaran terjadi di Kabupaten Banjar. Deforestasi adalah proses penebangan hutan alam dengan cara menebang kayu atau mengubah fungsi penggunaan lahan hutan. (Shafitri dkk, 2018) Di Kabupaten Banjar terjadi pengurangan luas hutan sebesar 32.209,24 hektar selama 10 tahun. Kawasan yang mengalami deforestasi berada di sisi timur Kabupaten Banjar yang merupakan salah satu kawasan hutan produksi. (Ramdhoni, dkk: 2019) Dampak lanjutan dari deforestasi adalah banjir. (Kumalawati dkk: 2021) Pada tahun 2021 Kabupaten Banjar merupakan daerah yang paling terdampak banjir di Kalimantan Selatan, khususnya dalam kurun waktu 50 (lima puluh) tahun terakhir.

Isu lingkungan yang dibahas dalam penelitian ini adalah deforestasi. Dalam perspektif ilmu kehutanan, deforestasi diartikan sebagai suatu keadaan dimana tutupan hutan hilang dan atribut-atributnya berimplikasi pada hilangnya struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Makna tersebut diperkuat dengan definisi deforestasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.30/Menhut/II/2009 tentang Tata Cara Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) yang secara tegas menyatakan bahwa Deforestasi adalah perubahan permanen dari kawasan hutan menjadi kawasan tidak berhutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Tinjauan terhadap penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, yang pertama adalah penelitian yang membahas tentang Rawa Pening di Kabupaten Semarang dalam perspektif politik lingkungan. Dalam tinjauan ini, Rawa Pening merupakan bagian dari sistem yang lebih kompleks, yang melibatkan aktor sosial-politik. Dalam kerangka ini, pembangunan yang ditujukan ke Rawa Pening melibatkan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat setempat, sehingga Rawa Pening tidak lagi dilihat hanya sebagai wilayah serapan air, namun juga sebagai ruang wacana kebijakan publik yang melibatkan masyarakat, negara, dan tentu saja ekosistem itu sendiri. Kajian penelitian kedua terkait dengan perspektif ekologis kebijakan pengelolaan Danau Limboto. (Hasim: 2018) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan Danau Limboto berorientasi pada politik lingkungan. Kebijakan ekologi politik pengelolaan Danau Limboto belum dibangun secara terintegrasi dalam konteks kelembagaan, substansi, dan regulasi. Berdasarkan tinjauan kedua kajian tersebut, penguatan penelitian tentang analisis deforestasi di Kabupaten Banjar berdasarkan perspektif ekologi politik relevan untuk dilakukan. Selain itu, pembahasan ekologi politik untuk kajian perubahan lingkungan di Kalimantan masih sangat minim, padahal potensi sumber daya alamnya sangat tinggi dan mengalami degradasi di berbagai sisi. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian tentang aspek sosial politik dalam konteks deforestasi di Kabupaten Banjar.

Berdasarkan penjelasan yang ada, deforestasi di Kabupaten Banjar perlu dikaji dengan menggunakan perspektif ekologi politik. Kajian ini mampu memberikan penjelasan sisi lain dari fenomena perubahan lingkungan, dengan mengkaji aspek sosial politik. Lokasi penelitian di Kabupaten Banjar merupakan lokasi yang layak untuk ditetapkan, apalagi deforestasi telah menimbulkan dampak lanjutan berupa bencana banjir yang sangat luas

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan analisis mendalam, yaitu proses dan makna (perspektif subjek) yang lebih rinci dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan dengan pertimbangan relevansi dengan isu penelitian, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan realitas peristiwa yang diteliti, sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh data yang objektif guna mengetahui dan memahami politik lingkungan dalam konteks deforestasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deforestasi dalam Kajian Sosial Masyarakat

Penduduk Kabupaten Banjar terdiri dari Suku Banjar. Orang Banjar mengenal ungkapan gawi manuntung yang artinya seseorang dalam melakukan sesuatu harus dapat menyelesaikannya dengan baik. (Makkie dan Seman: 1994 Berdasarkan hasil wawancara dengan budayawan di Kabupaten Banjar dijelaskan bahwa ada empat nilai budaya Banjar, yaitu nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan, dalam hubungan manusia dengan manusia, dalam hubungan manusia dengan diri sendiri atau berkaitan dengan aktivitas manusia sebagai bentuk pengembangan diri, dan nilai Budaya Banjar dalam hubungan manusia dengan alam (Istiqomah dan Setyobudihono: 2017) Lebih khusus terkait dengan nilai budaya yaitu hubungan manusia dengan alam dijelaskan bahwa bersama lingkungan, manusia harus mampu beradaptasi. (Istiqomah dan Setyobudihono: 2017) Nasehat ini biasanya diberikan dalam rangka menyesuaikan diri dengan adat istiadat. (Makkie dan Seman: 1996) Hal ini dimaksudkan agar manusia sendiri bisa nyaman dalam menjalani kehidupan, yaitu hidup damai dengan alam. (Istiqomah dan Setyobudihono: 2017)

Berdasarkan nilai budaya manusia dan lingkungan, pola penyesuaian masyarakat terhadap lingkungan berdampak pada kelestarian hutan di Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diketahui bahwa aspek sosial budaya khususnya aktivitas masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan di Kabupaten Banjar. Faktor dominan antara lain kebiasaan, pembukaan lahan pertanian, kegiatan yang tidak disengaja seperti membakar sampah atau saat mencari kayu bakar, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan

bahaya kebakaran hutan. Selain itu, terkait interaksi masyarakat dengan alam, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) relatif rendah. Hal ini tercermin dari kurangnya motivasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, diakui oleh masyarakat lain, serta melestarikan alam. (Hafizianor dan Mokhamad: 2017) Rendahnya partisipasi masyarakat ini terjadi di berbagai bentuk masyarakat, baik berupa dukungan dari lembaga swadaya masyarakat, dukungan dari tokoh masyarakat. (Hafizianor dan Mokhamad: 2017) Selain rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan, Indeks Penerimaan Sosial (IPS) hasil sempadan kawasan hutan di kawasan KPH Kabupaten Banjar dikategorikan sedang. (Hafizianor dan Mokhamad: 2017) Menurut masyarakat setempat, KPH Banjar masih belum jelas mengenai tata batas kawasan hutan. Sebagian besar masyarakat desa mengklaim kawasan yang dikelola selama ini sebagai hak milik dengan kekuatan hukum di tingkat desa (stempel kepala desa), sedangkan secara hukum kawasan hutan yang dikelola masyarakat termasuk dalam kawasan pengelolaan Hutan Tanaman Industri. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Kabupaten Banjar dijelaskan bahwa proses sosial politik di Kabupaten Banjar telah menerapkan oligarki terhadap lingkungan dan berada pada zona nyaman dalam menghasilkan kebijakan lingkungan. Zona nyaman ini berbasis ekonomi, dan dilakukan secara pragmatis berbasis kepentingan ekonomi pembangunan, pembangunan berbasis sektoral, normatif administratif, tanpa pengawasan holistik. Sistem oligarki ini dekat dengan pemerintah daerah dan memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan kepentingannya, dan dalam kondisi ini cenderung sulit diubah karena sudah berlangsung lama.

Selain kelompok masyarakat tersebut, juga terdapat LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) yang peduli terhadap pelestarian alam di Kabupaten Banjar. Kelompok-kelompok tersebut antara lain MaMFus Association (Masyarakat Peduli Sungai) (Forum Komunitas Hijau yang bergerak dalam penghijauan dengan menanam pohon, WALHI (Forum Lingkungan Hidup Indonesia) yang fokus pada kedaruratan spasial di Kalimantan Selatan dan bencana ekologi, dan Komunitas Melingai "Masyarakat Melindungi Sungai", dan Eco Mosque. Kelompok masyarakat ini merupakan bagian dari masyarakat yang juga memberikan masukan atau tuntutan kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi alam, termasuk ekosistem hutan dan sungai. Kelompok kelestarian lingkungan aktif mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan penjelasan aktivis organisasi lingkungan MaMFus, dijelaskan bahwa tuntutan telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui surat untuk melakukan perbaikan lingkungan dan menawarkan Program Gerakan Restorasi Lingkungan berbasis masyarakat dan regiusitas ilmiah. Hanya berdasarkan kepentingan dengan pandangan kepada Bupati Banjar, namun aspirasi tersebut tidak mendapat respon dari pemerintah daerah. Budaya keagamaan masyarakat Banjar mempengaruhi substansi suara politik masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Berdasarkan uraian yang ada, dapat dijelaskan bahwa masyarakat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori dalam aspek sosial politik. Kelompok pertama adalah kelompok masyarakat biasa yang berkontribusi terhadap deforestasi di Kabupaten Banjar. Hubungan alam dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan menunjukkan adanya bentuk penyesuaian diri dengan alam berupa pemanfaatan hutan untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Pemanfaatan ini tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa hutan merupakan bagian lingkungan yang sensitif, jika terus menerus digunakan dalam jumlah yang masif tanpa mempertimbangkan fungsi hutan akan menimbulkan kerusakan. Selain itu, keterpaduan pemerintah daerah dan masyarakat juga minim, padahal bertujuan untuk mengajak masyarakat memiliki kesadaran untuk mewaspadaai batas wilayah dalam pemanfaatan hutan. Kategori kedua adalah kelompok oligarki yang memiliki kedekatan dengan penguasa. Namun selain kondisi sosial masyarakat, terdapat kelompok sosial yang peduli terhadap lingkungan, dengan merangkul masyarakat lain dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan fungsi sumber daya alam di Kabupaten Banjar.

3.2 Deforestasi dalam Kajian Ekonomi Politik

Dalam kajian politik lingkungan, aspek ekonomi politik memiliki pengaruh. Laju deforestasi di Kabupaten Banjar tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan implikasi dari kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang. Hal ini dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Mengikuti UU Penanaman Modal Asing, juga diberlakukan Paket Deregulasi 6 Mei 1986 yang melonggarkan izin impor barang, penunjang modal, dan penggunaan tenaga kerja asing. Deregulasi ini khusus untuk investasi berorientasi ekspor atau membuka usaha di daerah. Paket ini kemudian ditegaskan kembali dalam Paket Juni 1987 dan Paket Desember 1987. Demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Pada Perusahaan yang Dibentuk Untuk Penanaman Modal Asing. Peraturan Pemerintah ini

mengatur ketentuan untuk menjamin kelangsungan penanaman modal asing dalam bentuk pendirian perusahaan penanaman modal asing berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia.

Selama bertahun-tahun, investasi asing lebih diprioritaskan daripada investasi dalam negeri. (Muzdalifah: 2020) Sejak berlakunya UU no. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk menggantikan UU Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968, perubahan ini juga mempengaruhi pengaturan pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia. Izin pengelolaan kawasan hutan di Indonesia oleh pihak swasta semakin meningkat, termasuk untuk kawasan hutan di Kabupaten Banjar, kegiatan eksplorasi kawasan hutan juga semakin tinggi.

Kebakaran hutan terjadi secara sistematis. Pembakaran dilakukan oleh perusahaan pemegang izin perusahaan hutan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan selain perusahaan lokal juga merupakan perusahaan penanaman modal asing. Perusahaan penanaman modal asing adalah perusahaan yang modalnya merupakan penanaman modal asing atau penggabungan dengan modal dalam negeri. Aliran modal asing ke Indonesia pada tahun 1960-an praktis tidak ada, dan semakin menguat sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Paket 6 Mei 1986 dan Pakto 1993, PP No. 20 Tahun 1994. Melalui aliran modal asing inilah Indonesia memperoleh pendapatan ekonomi, khususnya dari bidang pengelolaan hutan.

Pencapaian kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional semakin diperkuat melalui perubahan kewenangan pengelolaan hutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan kehutanan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini berbeda dengan sebelumnya, dimana pengelolaan hutan pada Lampiran Poin BB halaman 116 menjelaskan bahwa kewenangan Daerah Provinsi adalah membantu perencanaan kehutanan, yang dapat berupa usulan pertimbangan teknis perencanaan kehutanan. Lebih khusus lagi, kewenangan tersebut meliputi pelaksanaan tata kelola hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pelaksanaan rencana pengelolaan KPH. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu bahwa pemerintah kabupaten juga memiliki kewenangan untuk mengelola hutan di wilayahnya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, setiap satuan wilayah KPH (khususnya KPHL dan KPHP) ditangani oleh lembaga daerah yang dibentuk oleh pemerintah provinsi untuk satuan wilayah KPH lintas kabupaten, dan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk satuan wilayah KPH dalam kabupaten/kota.

Perubahan kewenangan dalam UU tersebut merupakan langkah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah, dan antar daerah, potensi dan keragaman daerah, serta peluang dan tantangan, persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara. (Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Melalui uraian yang ada, dapat dipahami bahwa laju deforestasi saat ini tidak terjadi begitu saja, tetapi berkorelasi dengan orientasi kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini difasilitasi oleh kebijakan yang memberikan peluang dan jaminan hukum yang lebih luas kepada investor, baik domestik maupun asing. Dukungan terhadap kapitalisme ini mencakup sektor pengelolaan hutan untuk kepentingan ekonomi yang masif dan pengembangan usaha di berbagai daerah. Selain itu, perubahan kewenangan pengelolaan hutan menjadi di bawah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi merupakan strategi efisien pemerintah untuk meningkatkan kontrol pemerintah agar pengelolaan hutan bersinergi dengan kepentingan ekonomi nasional.

3.3 Deforestasi dalam Studi Politik Lingkungan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, perubahan lingkungan berupa deforestasi di Kabupaten Banjar tidak terjadi secara alami, tetapi merupakan hasil dari politisasi lingkungan yang melibatkan banyak aktor, baik aktor lokal, regional, maupun global dengan berbagai kepentingan. Politisasi lingkungan yang terjadi melibatkan banyak aktor yang terhubung dalam proses politik dengan arus bolak-balik antara input dan output. Para aktornya berasal dari kalangan yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda.

Berdasarkan aspek sosial politik dalam perubahan lingkungan, berikut penjelasannya. Aktor lokal yang terlibat antara lain masyarakat, kelompok peduli lingkungan, dan kelompok oligarki. Kelompok masyarakat biasa ini bukan hanya kelompok yang terkena dampak perubahan lingkungan, tetapi juga sebagai pelaku kebakaran hutan di Kabupaten Banjar. Hal ini dilakukan dengan membuka lahan untuk pertanian untuk tujuan ekonomi, dan menjadi resisten terhadap kebijakan pengelolaan hutan. Aktor kedua adalah kelompok peduli lingkungan yang umumnya menyuarakan perbaikan lingkungan, termasuk mengembalikan fungsi hutan agar tidak dimanfaatkan untuk

kepentingan ekonomi. Beberapa kelompok peduli lingkungan ini merekomendasikan program perbaikan lingkungan berbasis religiusitas, secara aktif mengajukan tuntutan kepada pemerintah daerah. Dalam sistem politik di Kabupaten Banjar dikuasai oleh sistem oligarki yang sangat kuat, mempengaruhi, mengusulkan, dan mengikutsertakan kepentingan bisnis dalam pemerintahan, termasuk pengelolaan hutan.

Kepentingan nasional merupakan persepsi terhadap perekonomian nasional, yang dari waktu ke waktu orientasi ini semakin masif. Sumber daya alam berupa hutan merupakan komoditas yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi, dan menjadi mega proyek nasional. Dalam kondisi ini, pembagian peran antara pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri semakin meningkat. Selain itu, untuk pengelolaan hutan strategis, pengelolaan hutan bersifat sentralistik, yaitu semua perencanaan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pelaksana perencanaan. Pemerintah kabupaten hanya mengelola hutan kota, dan kehilangan kewenangan untuk mengelola hutan yang berada di dalam wilayahnya.

Melalui penjelasan tersebut, dapat dicermati bahwa dalam lingkungan politik saat ini, peran pemerintah pusat sangat strategis. Hal ini ditunjukkan melalui orientasi kebijakan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada aliran modal dalam dan luar negeri. Berikutnya adalah pemerintah provinsi yang merupakan pihak pelaksana, memiliki peran signifikan dalam pemberian izin pengelolaan hutan. Dalam politik lokal, pengaruh oligarki begitu kuat untuk memasukkan kepentingan bisnis mereka, dan berikutnya adalah kelompok sosial yang anti kebijakan pemerintah.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa deforestasi di Kabupaten Banjar erat kaitannya dengan orientasi politik lingkungan. Dalam orientasi ini melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan, sehingga kebijakan pengelolaan hutan tidak terfokus pada mempertahankan fungsi hutan. Pelaku yang terlibat antara lain unsur masyarakat sekitar kawasan hutan di Kabupaten Banjar, kelompok peduli lingkungan, kelompok oligarki, pengusaha, dan pemerintah sendiri. Kelompok masyarakat dalam hal ini tidak hanya terkena dampak kerusakan hutan, tetapi juga sebagai kelompok yang resisten terhadap kebijakan konservasi hutan, sekaligus sebagai bagian dari pelaku kebakaran hutan. Aktor selanjutnya adalah kelompok peduli lingkungan yang aktif menggalang kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan dan menuntut pemerintah mengembalikan fungsi hutan dengan pendekatan religiusitas. Aktor selanjutnya adalah kelompok oligarki yang dekat dengan penguasa. Para aktor ini bersama-sama dengan pemerintah merumuskan kebijakan atau program pengelolaan hutan berdasarkan pembangunan daerah. Pelaku selanjutnya adalah kelompok pengusaha yang diberikan konsesi luas dalam konsesi hutan. Selanjutnya adalah aktor pemerintah itu sendiri, dengan kompleksitas aktor dan kepentingan yang ada, pemerintah dalam hal ini tidak merumuskan kebijakan yang berorientasi pada menjaga keberadaan hutan, melainkan kombinasi kepentingan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, mewadahi kepentingan kelompok bisnis, dan oligarki.

Sumber daya alam berupa hutan merupakan komoditas yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi, dan menjadi mega proyek nasional. Dalam kondisi ini, pembagian peran antara pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri semakin meningkat. Selain itu, untuk pengelolaan hutan strategis, pengelolaan hutan bersifat sentralistik, yaitu semua perencanaan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi bertindak sebagai pelaksana perencanaan. Pemerintah kabupaten hanya mengelola hutan kota, dan kehilangan kewenangan untuk mengelola hutan yang berada di dalam wilayahnya.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Lambung Mangkurat sebagai pihak pendukung dana, sehingga terlaksana penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alviya, I., & Suryandari, E. Y. (2009). Implementasi dan Strategi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Banjar. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1). <http://ejournal.forda-mof.org/ejournal-litbang/index.php/JAKK/article/view/341>
- Bryant dan Bailey. (2005). *Third World Political Ecology*. London & New York: Routledge.
- Easton, D. (1965). *A System Analysis of Political Life*, New York, ohn Wiley and Sons.

- Erdogan, E. (2004). An Exploration of the Politicization Concept of Putnam: Determinants of Attitudes of Citizens about Foreign Policies. Turki: BogaziciUniversity.
- Forsyth, T. (2004). *Critical political ecology: the politics of environmental science*. Routledge.
- Fuad, R. Identifikasi Deforestasi Melalui Pemetaan Tutupan Lahan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 2019
- Greenberg, & Park. (1994). Political ecology. *Journal of Political Ecology*, 1(1), 1–12.
- Hafizianor, H., & Mokhamad, S. (2017). Indeks Penerimaan Sosial Masyarakat Terhadap Penataan Batas Kawasan Hutan Di Kph Model Banjar.
- Hasim, H. (2018). Perspektif Ekologi Politik Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 7(1), 44-52. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/Publik/article/view/106>
- Istiqomah, E., & Setyobudihono, S. (2017). Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi Indigenou. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 5(1), 1-6.
- Kumalawati, R., Yulianti, A., Anggraeni, R. N., & Murliawan, K. H. (2021). The Potential Mapping of Land Fire Using SNPP VIIRS as a Basis for Environmental Damage Mitigation. <https://doi.org/10.5109/4491638>
- Makkie & Seman. (1996). Peribahasa dan Ungkapan Tradisional Bahasa Banjar. Banjarmasin: Dewan Kesenian Daerah Kalimantan Selatan.
- Martini, R. (2010). Politisasi birokrasi di Indonesia. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 1(1). Universitas Diponegoro.
- Muzdalifah, S. (2020). Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Tahun 2019 (Refleksi atas Globalisasi dan Reduksi Kewenangan Pemerintah). *PUBLIC CORNER*, 15(2), 1-11. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FISIP/article/view/1102>
- Muzdalifah, S., Qubayla, F., & Khaidir, S. (2021). Management Strategy of Sub-Watersheds Affected By Flooding In Banjar District, South of Kalimantan. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 1(02), 126-134. <https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei/article/view/33>
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2004). *Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective*. London: Routledge.
- Shafitri, L. D., Prasetyo, Y., & Haniah, H. (2018). Analisis Deforestasi Hutan di Provinsi RIAU dengan Metode Polarimetrik dalam Pengindraan Jauh. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(1), 212-222.
- Sompa, A. T., Muzdalifah, S., Hakim, A. R., & Padel, M. (2021). Model Perilaku Pemerintahan Daerah Lahan Basah Studi Kasus: Pelayanan Transportasi Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. In *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 6, No. 3). <https://snllb.ulm.ac.id/prosiding/index.php/snllb-lit/article/view/633>
- Sompa, A. T., Muzdalifah, S., & Hakim, A. R. (2021, April). Model of public health service in wetlands. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 758, No. 1, p. 012013). IOP Publishing. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/758/1/012013/meta>
- Sompa, A. T., Hakim, A. R., Tiyani, D. A., & Muzdalifah, S. (2021). Environmental Political Model and Deforestation Analysis in South Kalimantan, Indonesia. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*, 1(02), 158-165. <https://ojs.wiindonesia.com/index.php/ij3pei/article/view/57>

SERTIFIKAT

No. 202.995/UN8.2/PG/2022



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sertifikat diberikan kepada:

ANDI TENRI SOMPA

Atas partisipasinya sebagai:

Pemakalah Oral (Penelitian)

Pada Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2022 dengan tema "LPPM sebagai Core Novelty Riset dan Pengabdian dalam Pembangunan Lingkungan Lahan Basah secara Berkesinambungan" yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal 1 - 2 November 2022 di Hotel Aria Barito Banjarmasin

Banjarmasin, 2 November 2022



LPPM ULM,

[Signature]
Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si

NIP. 19680507 199303 1 020



Ketua Panitia Pelaksana,

[Signature]
Dr. Laila Anyani Sofia, S.Pi, M.P

NIP. 19730428 199803 2 002